

RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA DARI MASA KE MASA *(Tinjauan dari Perspektif Kewarganegaraan)*

Yosaphat Haris Nusarastriya

Abstract

"Radicalism and terrorism occurred in Indonesia from time to time with different motif, backgrounds, and display. Viewed from the perspective of citizenship radicalism, terrorism is a concept that includes how to think, and behave. One study based on the perspective of citizenship is about thinking of citizenship itself. It is closely related to the three elements of civic knowledge, civic skills, and civic virtue. Radicalism and terrorism viewed from the perspective of citizenship is a problem in a democracy and state of law. Each country demanded democracy and legal state principles of democracy while the principles of law will bring good life together as a nation or state.

Keywords: *Radicalism, Terrorism, Perspective, Citizenship*

Pendahuluan

Tulisan ini tentang radikalisme dan terorisme di Indonesia dari masa ke masa ditinjau dari perspektif kewarganegaraan. Secara teoritis perspektif kewarganegaraan akan melihat radikalisme dan terorisme sebagai konsep yang mencakup cara berpikir dan bertindak. Radikalisme dan terorisme timbul dan merupakan fenomena dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sering melibatkan hubungan antara warga negara dan negara, warga negara (kelompok) dengan warga negara (kelompok) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, malahan di era globalisasi radikalisme dan terorisme melibatkan kelompok dan jaringan yang bersifat internasional.

Ditinjau dari perspektif kewarganegaraan hal itu termasuk permasalahan yang menyangkut tingkah laku dan cara berpikir kewarganegaraan yang perlu dikaji. Kajian itu mencakup *civic knowledge*, *civic skill*, dan *civic virtue*. Tulisan ini bertujuan mendeskripsikan radikalisme dan terorisme dari masa ke masa dilihat dari *civic knowledge*, *civic skill* dan *civic virtue*. Dari deskripsi tersebut akan diperoleh gambaran mengenai perkembangan dan karakteristik serta bentuk-bentuk radikalisme dan terorisme sehingga strategi apa yang perlu dilakukan untuk mencegah radikalisme dan terorisme di Indonesia.

Radikalisme dan Terorisme

Apa sesungguhnya radikalisme? Kalidjernih, (2010:140) menyatakan radikalisme adalah suatu komitmen kepada perubahan keseluruhan yakni yang menantang struktur dasar atau fundamental, tidak hanya pada lapisan-lapisan superfisial. Secara etimologis radikalisme berasal dari kata *radix* (latin) yang berarti akar yang kemudian menjadi inti dari makna *radicalism* yang secara politik kemudian diarahkan kepada setiap gerakan yang ingin merubah sistem dari akarnya.

Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata teror adalah kegiatan yang menciptakan ketakutan, kengerian, atau kekejaman oleh seseorang atau golongan. Terroris adalah orang yang

menggunakan kekerasan untuk menimbulkan rasa takut, biasanya untuk tujuan politik (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1995, 1048). Terrorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap sasaran sipil untuk menimbulkan ketakutan sebagai usaha untuk mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik)

Menurut Hukum Positif Indonesia: UU No:15 Tahun 2003, Bab III pasal: 6, dikemukakan: "bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau internasional" diancam dengan pidana hukuman mati, penjara seumur hidup atau penjara 4 tahun hingga 20 tahun.

Perspektif Kewarganegaraan

Berdasarkan perspektif kewarganegaraan dikenal adanya tiga komponen yaitu pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), kecakapan kewarganegaraan (*civic skill*), dan watak kewarganegaraan (*civic virtue*). Komponen-komponen itulah yang akan menjadikan warga negara memiliki kompetensi sehingga berpredikat sebagai warga negara yang baik (*good citizen*).

Civic Knowledge (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan kandungan atau apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. *Civic Knowledge* (pengetahuan kewarganegaraan) berkaitan dengan materi atau substansi yang harus diketahui warga negara. Komponen pengetahuan diwujudkan dalam bentuk pemaknaan terhadap struktur dasar sistem kehidupan bermasyarakat, berpolitik, berpemerintahan, dan mengapa politik dan pemerintahan itu diperlukan; tujuan pemerintahan, ciri-ciri penting pemerintahan, hakikat dan tujuan konstitusi dan cara-cara alternatif mengorganisasikan pemerintahan.

Komponen kedua (*Civic skill*) kecakapan/ketrampilan kewarganegaraan yaitu sebagaimana dikemukakan oleh *The National and Standards of Civic and Government* dan *The Civic Frame work For 1998 National Assessment of Educational Progress (NAEP)* sebagai berikut: "*identifying and describing; explaining and analyzing; and evaluating, taking and defending positions on public issue*" (Bransons,1998:8). Termasuk dalam komponen ini ialah ketrampilan intelektual yang terpenting bagi terbentuknya warga negara yang berwawasan luas, efektif, dan bertanggungjawab antara lain adalah keterampilan berpikir kritis.

Ketrampilan berpikir kritis meliputi mengidentifikasi, menggambarkan, mendeskripsikan, menjelaskan, menganalisis, mengevaluasi, menentukan, dan mempertahankan pendapat yang berkenaan dengan masalah-masalah publik. *Civic Skill* (ketrampilan kewarganegaraan) merupakan ketrampilan yang dikembangkan dari pengetahuan kewarganegaraan agar pengetahuan yang diperoleh menjadi sesuatu yang bermakna, karena dapat dimanfaatkan dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara.

Komponen ketiga yaitu *Civic virtue* (watak kewarganegaraan) mengisyaratkan pada karakter publik maupun privat. Watak kewarganegaraan berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan dialami oleh seseorang baik di rumah, sekolah, dan di masyarakat. Dari perspektif kewarganegaraan terdapat lingkungan pendidikan yaitu dunia persekolahan dan di lingkungan luar sekolah (di masyarakat dan keluarga). Pendidikan Kewarganegaraan di sekolah dapat dipakai sebagai pendidikan demokrasi. Pendidikan demokrasi mengandung unsur *knowledge*, *skill*, dan *virtue*.

Radikalisme di Indonesia

Menurut data hasil penelitian indeks kerentanan radikalisme di Indonesia pada tahun 2011 yang dirilis oleh Birru, L. (2011) di Media Center pada 15 Oktober adalah 43,6. Indeks radikalisme ini diperoleh dari hasil penelitian kerentanan radikalisme terhadap 33 provinsi dengan jumlah responden sebanyak 4.840. Sampai kapan konflik akan terus terjadi di Indonesia? Potensi konflik antar elemen masyarakat di Indonesia masih akan cukup tinggi pada lima hingga sepuluh tahun mendatang (*Kompas, Jumat 10 Februari 2012*). Selain karena kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya sejahtera, situasi ini juga terjadi karena demokrasi di negeri ini masih belum matang.

Radikalisme hampir selalu disebabkan oleh faktor eksternal dan internal yang terjadi secara simultan sebagai faktor penentu terciptanya proses radikalisasi. Sedangkan fanatisme hampir selalu merupakan proses internal terciptanya keyakinan di dalam hati yang bahkan tidak terlalu membutuhkan rangsangan dari eksternal. Aksi-aksi radikalisme muncul karena disebabkan oleh adanya sikap tidak menerima perbedaan. Perbedaan yang muncul di masyarakat dianggap sebagai sebuah ancaman terhadap eksistensi kaum radikal.

Terorisme di Indonesia dari Masa ke Masa

Menurut teori sejarah dalam waktu, terdapat 4 hal, yaitu: (1) *perkembangan*, (2) *kesinambungan*, (3) *pengulangan*, dan (4) *perubahan*. Berkaitan dengan itu, teori sejarah mencakup: (1) *teori spiral* (2) *teori kemajuan*, (3) *teori siklus*. Berkaitan dengan itu, maka, yang terjadi di Indonesia terorisme menunjukkan adanya perputaran (pengulangan) dan kadang-kadang ada perubahan dan variasi dalam penampilannya walaupun semuanya sebenarnya dari sisi definisi ada unsur yang tetap yang memberi ciri sama dari masa ke masa.

Periode 1945-1965

Pada periode ini ditandai dengan berlakunya UUD 1945 tahap I yaitu 18 Agustus 1945 s/d 27 Desember 1949, diteruskan dengan masa berlakunya Konstitusi RIS (27 Desember 1949-17 Agustus 1950) dan Masa berlakunya UUD S 1950 (17 Agustus 1950-5 Juli 1959). Pada periode ini ditandai dengan gerakan-gerakan DI/TII yang mencakup Jawa Barat (1949-1962). DI/TII Ibnu Hadjar di Kalimantan (1950;1959), DI/TII Batalyon 426 dan gerombolan lain di Jawa Tengah (1951-1954). DI/TII Kahar Muzakar

di Sulawesi Selatan 1951-1965). DI/TII Daud Beureuh di Aceh (1953-1962), (Bambang S. Sulasmono: 2002).

Tabel 1.
Kondisi di Awal Sejarah Ketatanegaraan RI 1945-1965

| No | Bidang | Fenomena Desintegrasi | Pancasila dan Sistem Ketatanegaraan |
|----|----------------|---|--|
| 1 | Ideologi | Menguatnya paham komunisme, agama dan separatisme, primordialisme | Pancasila belum mantap sebagai dasar negara dan wawasan kebangsaan Perubahan Bentuk negara (Negara Kesatuan → Negara serikat → Negara kesatuan) Perubahan UUD 1945 → Konstitusi RIS → UUDS 1950 → UUD 1945 Sistim Pemerintahan (Presidensiil → Parlementer → Presidensil) |
| 2 | Sosial Politik | Konflik antar golongan, SARA meningkat, muncul organisasi dan gerakan-gerakan yang mendasarkan primordialisme Timbul berbagai pemberontakan DI TII, APRA, Pemberontakan Andi Azis, RMS, PRRI/PERMESTA, G 30 S/PKI Menjamurnya partai politik dengan ormas-ormasnya Timbul Politik Aliran : Nasionalisme, sosial demokrat dan komunisme | |
| 3 | Militer | ABRI terpecah berdasarkan matranya masing-masing | |
| 4 | Kewilayahan | Timbulnya gerakan separatis (pemisahan) | |

Istilah yang menonjol pada periode ini bukan terorisme melainkan gerakan bersenjata dan pengacau keamanan. Permasalahan yang dihadapi adalah bersifat ideologis dan sparatis dengan motivasi dasar yang menjadi penggeraknya adalah bersifat ideologis-politis juga. Selain gerakan-gerakan politik yang bernuansa ideologis, juga ditandai oleh gerakan-gerakan yang bernuansa kedaerahan yaitu pemberontakan PRRI dan Permesta sebagai gerakan separatis yang menghendaki pemisahan wilayah. Dilihat dari skala sasaran gerakannya, pada periode ini termasuk dalam kategori nasional, yaitu gerakan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang ada pada suatu wilayah dan kekuasaan Negara nasional, yang berupa pemberontakan bersenjata, pengacauan stabilitas nasional, dan gangguan keamanan nasional.

Ditinjau dari perspektif kewarganegaraan dari unsur *civic knowledge*, maka pengetahuan mengenai kewarganegaraan masih lemah, tentu ini berkaitan dengan pendidikan khususnya dalam kaitannya dengan hubungan antara negara dan warga negara misalnya demokrasi, negara hukum, penegakan hak asasi manusia. Penghayatan dalam kehidupan bersama khususnya yang berkaitan dengan komitmen sebagai bangsa dalam kehidupan bernegara, penerimaan antara golongan yang satu terhadap golongan yang lain atau masalah rasa kebangsaan juga belum didukung dengan *civic skills* yang memadai (seperti kemampuan berpikir kritis, kecakapan dalam berdemokrasi, dan kecakapan dalam mewujudkan rasa nasionalisme).

Kehidupan berbangsa pada periode ini juga masih diwarnai dengan kuatnya *etno nasionalisme*, eksklusivisme sehingga gerakan-gerakan yang terjadi pada masa itu bernuansa ideologis-keagamaan dan kedaerahan. Dilihat dari *civic virtue*, yang seharusnya semangat toleransi, nasionalisme/persatuan, keberadaban, dan keadilan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara, namun kenyataannya kehidupan berbangsa memperlihatkan kuatnya semangat kelompok baik dari sisi etnis, agama maupun politik golongan. Dalam semangat yang demikian itu intoleransi dan timbulnya *distrust* bisa terjadi. Kalau hal itu

terjadi maka merupakan hal yang signifikan mempengaruhi seseorang bersikap curiga, bertindak radikal yang memicu tindakan-tindakan terorisme.

Politik aliran pada periode ini cukup menonjol tetapi belum disertai dengan semangat berdemokrasi dan budaya demokrasi yang baik. Akibatnya yang menonjol adalah semangat *egocentris* yang menegasi kelompok lain. *Civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic virtue* juga masih rendah. Hal tersebut juga disebabkan oleh pemahaman mengenai ideologi (Pancasila), demokrasi, negara hukum, penghayatan kehidupan bersama yang masih kurang memadai. Dilihat dari *civic skills*, memperlihatkan kecakapan dalam berdemokrasi kurang didukung oleh kesediaan untuk menghormati dan toleransi serta penerimaan dalam kehidupan bersama. Semangat untuk menang sendiri dalam berdemokrasi terlihat cukup kuat dalam kelompok (politik aliran). *Civic virtue* yang mengedepankan nilai-nilai yang membentuk karakter baik (*good character*) pada periode ini juga kurang mendapat iklim yang baik karena semangat egosentris dalam kehidupan politik sangat kuat. Hal tersebut ditandai dengan konflik-konflik ideologis yang memuncak pada pemberontakan G/30/S/PKI.

Periode 1966-1998 (Masa Orde Baru)

Periode ini pemberontakan yang bersumber pada ideologi masih terasa tetapi tidak mendapat tempat karena negara cukup kuat menghadapi pemberontakan-pemberontakan itu, seiring dengan menguatnya Pancasila sebagai dasar negara karena didukung sistem ketatanegaraan yang lebih menempatkan stabilitas keamanan dan politik. Sentimen kedaerahan dan kecemburuan terhadap daerah lain terjadi sehingga menjadi benih-benih terjadinya gerakan untuk memisahkan diri dari negara kesatuan. Teror yang terjadi pada masa ini berupa gangguan-gangguan keamanan dan teritorial sehingga menuntut penguatan pada aspek keamanan dilakukan melalui penerapan Dwi Fungsi ABRI. Istilah terorisme lebih menunjuk pada gerakan pengacau keamanan bersenjata. Obsesi untuk menciptakan terutama stabilitas keamanan dan stabilitas di berbagai bidang terjadi pada masa Orde Baru sebagai reaksi dari kondisi sebelum Orde Baru di mana Indonesia tercatat sebagai negara yang tidak stabil di dunia. Stabilitas keamanan dan sosial politik dapat mendorong terwujudnya pembangunan di bidang ekonomi.

Tabel 2.
Kondisi di Zaman Orde Baru

| No | Bidang | Fenomena | Keadaan | Implikasi terhadap Teroris |
|----|----------|---|--|---|
| 1 | Ideologi | Penghayatan dan kesatuan ideologi berjalan | Pancasila semakin kuat | Tidak terlalu banyak bom meletus Pemberontakan dan gejolak dapat ditekan |
| 2 | Politik | Penyederhanaan dan fusi Parpol (Golkar, PDI, PPP) | Stabilitas politik terwujud | |
| 3 | Sosial | Integrasi sosial/nasional berjalan, berkurangnya konflik kesukuan, pendidikan semakin meluas | Negara relatif stabil/negara lebih dominan Pembangunan berjalan | |
| 4 | Budaya | Berkembangnya Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional (sebagai alat komunikasi) Berkembangnya kebudayaan nasional, keterbukaan masyarakat | Lebih bersifat Top Down Kebebasan dan demokrasi dibatasi | |

| | | | | |
|---|-------------|---|--|--|
| | | dan surutnya etnosentrisme dan primordialisme | | |
| 5 | Ekonomi | Pembangunan ekonomi berjalan dan semakin luas jangkauannya Terbukanya kesempatan berusaha dan adanya peluang bagi rakyat untuk berpartisipasi. Adanya program kemitraan dan Ipres Desa Tertinggal | | |
| 6 | Hankam | Dimiliki wawasan dan doktrin yang sama pada semua angkatan (AU, AD, AL, dan Kepolisian) Peran ABRI dengan Dwi Fungsinya | | |
| 7 | Kewilayahan | Berkembangnya hukum laut yang lebih menjamin kesatuan wilayah (laut teritorial, landas kontinen dan ZEE) Hubungan pusat daerah dikontrol dari pusat | | |

Ditinjau dari perspektif kewarganegaraan khususnya pada unsur *civic knowledge*, pada masa Orde Baru, negara berusaha untuk mengembangkan pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sehingga warga negara akan lebih memahami falsafah bangsa, ideologi nasional dan hak serta kewajiban sebagai warga negara. Pemahaman (*civic knowledge*) sangat diperlukan bagi warga negara agar menjadi warga negara yang baik (*good citizen*). Di samping itu *civic skill* juga memperlihatkan peningkatan terutama pada dekade tahun 1990-an yang ditandai dengan keinginan warga masyarakat untuk ikut menentukan jalannya pemerintahan melalui menguatnya kebebasan pendapat dan organisasi masyarakat (LSM). Sedangkan jika dilihat dari *civic virtue* menunjukkan keinginan untuk menegakkan prinsip-prinsip HAM maupun demokrasi seperti kebebasan, toleransi, penegakan hukum, dan keadilan yang puncaknya pada keinginan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and clean governments*).

Periode 1999 – 2004

Periode ini merupakan masa transisi sehingga situasi kehidupan berbangsa dan bernegara belum mantap di berbagai bidang. Teror dan gangguan keamanan, konflik melanda kehidupan berbangsa dan bernegara. Ada nuansa politik, ekonomi, dan keamanan dalam konflik sebagaimana terjadi di Jawa, Ambon, Poso, Bali, Kalimantan (Sampit), dan daerah lain. Teror dalam periode ini lebih terwujud pada gerakan mengacau keamanan dan ketentraman masyarakat, walaupun tendensi ke arah politik juga pasti ada. Era reformasi yang ditandai oleh kebebasan dan otonomi memunculkan organisasi kemasyarakatan dan LSM. Namun organisasi dan LSM yang berkembang tidak serta merta terhitung sebagai bagian dari *civil society* karena kebebasan di era reformasi kadang-kadang ada yang menghayatinya secara salah. Masyarakat baru yang diharapkan adalah sebagai masyarakat yang menghormati ketertiban, penegakan hukum, penegakan Hak Asasi Manusia, masyarakat yang beradab, menegakkan keadilan, persatuan, dan religius, namun kenyataannya masih ada anarkisme, kekerasan, pemaksaan kehendak, dan main hakim sendiri.

Tabel 3.

Teror Bom di Masa Pemerintahan Transisi

| No | Tahun | Bentuk Teror |
|----|-------|--|
| 1 | 1999 | Pemboman Toserba Ramayana Jakarta, Pemboman Mall kelapa Gading , Pemboman Hayam Wuruk Plaza |
| 2 | 2000 | Bom Kedubes Filipina (1 Agustus 2000), Bom kedubes Malaysia (27 Agustus 2000) Bom Bursa Efek (13 September 2000), Bom malam natal (24 Desember 2000) |
| 3 | 2001 | Bom Gereja Santa Anna dan HKBP (22 Juli 2001), Bom Plaza Atrium Senen Jakarta (23 September 2000), Bom Restoran KFC, Makasar (12 Oktober 2001) Bom Sekolah Australia (AIS) Pejaten, Jakarta. |
| 4 | 2002 | Bom Tahun Baru (1 Januari 2002), Bom Bali (12 oktober 2002) Bom restoran McDonald's 5(Desember 2002) |
| 5 | 2003 | Bom Kompleks Mabes Polri, Jakarta (3 Februari 2003) Bom Bandara Soekarno-Hatta jakarta (27 April 2003) Bom JW Marriott (5 Agustus 2003) |
| 6 | 2004 | Bom Palopo 10 Januari 2004, Bom Kedubes Australia Ledakan Bom di Gereja Immanuel Palu, Sulawesi Tengah (12 Desember 2004) |

Tabel disarikan dari: Haryono, Endi (2010) "Kebijakan Anti-Terrorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi, *JSP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol 14, Nomor 2, November ISSN 1410-4946.

Pada periode ini karena masih dalam periode transisi maka keadaan yang belum menentu atau belum stabil ikut mempengaruhi kehidupan warga negara. Kelemahan yang tampak terjadi pada *civic skills* yang belum mantap. Demo anarkhis, provokasi, dan penggunaan kelompok tertentu untuk kepentingan politik menunjukkan bahwa keterampilan berdemokrasi masih kurang didukung dengan sikap yang cerdas. Berpikir kritis sering ditinggalkan sehingga perasaan dan emosi lebih dominan dan menguat dalam interaksi sosial. *Civil society* juga belum meluas walaupun LSM tumbuh bak jamur di musim hujan namun kualitas LSM belum semua mencerminkan karakter *civil society* yang baik.

Dilihat dari *civic virtue* terkadang kecenderungan gaya dan sikap pragmatis, bebas yang disertai dengan menguatnya kesadaran individu dalam interaksi kehidupan bermasyarakat kadang-kadang menenggelamkan sikap mental yang ideal seperti kejujuran, keadilan, toleransi, dan kebenaran. Akibatnya, efektifitas dalam menegakkan nilai-nilai kearifan dan keutamaan yang disuarakan dalam reformasi melemah karena persaingan yang tidak sehat. Mengendornya sikap gotong royong, dan rasa penerimaan terhadap pihak lain dalam kehidupan bersama.

Periode 2005-2015

Sesuai dengan era globalisasi, maka terorisme dalam periode ini memperlihatkan corak global juga yaitu memanfaatkan jaringan internasional sehingga terorisme tidak hanya berasal dari warga negara/bangsa sendiri melainkan juga dari warga negara dan bangsa asing. Pada periode ini cara-cara yang digunakan untuk melakukan teror juga semakin canggih seiring dengan kemajuan teknologi modern.

Tabel 4.
Teror Bom 2005-2009

| No | Tahun | Bentuk terorisme |
|----|-------|--|
| 1 | 2005 | Bom meledak di Ambon (21 Maret 2005), Bom Tentena (28 Mei 2005), Bom Pamulang (8 Juni 2005, Bom Bali (1 Oktober 2005), Bom Bali II (1 Oktober 2005), Bom pasar Palu (31 Desember 2005) |
| 2 | 2009 | Bom Jakarta (17 Juli 2009) |

Peristiwa penyerangan *World Trade Center* yaitu gedung menara kembar di AS, misalnya, merupakan bukti bahwa begitu canggih juga peralatan yang digunakan teroris sehingga semua pihak tidak dapat mencegahnya. Kemudahan menciptakan ketakutan dengan teknologi tinggi dan liputan media yang luas membuat jaringan dan tindakan teror semakin mudah mencapai tujuan bukan hanya yang diarahkan pada pemerintah tetapi juga, tempat-tempat vital dan juga kepada masyarakat dengan modus dan motivasi yang beragam pula. Motiv penipuan seperti teror melalui SMS dari yang berkedok transfer uang sebagai syarat memperoleh undian bohong-bohongan sampai pada terror SMS untuk minta pulsa.

Tabel 5.
Teror 2009-2015

| No | Tahun | Bentuk terorisme | Keterangan |
|----|-------|-------------------------------------|---|
| 1 | 2015 | Teror lewat SMS Isu tentang ISIS | Teror yang berkedok penipuan Jaringan internasional <i>Islamic State Irak and Suriah</i> Terjadi penolakan terhadap ISIS di berbagai daerah melalui poster-poster |

Radikalisme dan Terorisme : Sebagai Masalah Bagi Negara Demokrasi dan Negara Hukum

Dari sudut perspektif kewarganegaraan, maka radikalisme merupakan masalah bagi demokrasi karena radikalisme bertolak belakang dengan nilai-nilai demokrasi. Setiap negara demokrasi dapat dipastikan adalah negara hukum sehingga radikalisme dan terorisme sebenarnya juga merupakan masalah serius dalam negara hukum. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai demokrasi sangat besar perannya membentuk karakter masyarakat baru yang diharapkan setelah reformasi. Masyarakat baru itu terbentuk melalui proses perubahan sikap individu warga negara yang mencerminkan nilai-nilai demokrasi dan rasa hormat serta tanggung jawab yang juga ditandai oleh hal-hal berikut: (Sri Wuryan dan Syaifullah: 2009).

1. Menjunjung tinggi harkat, derajat dan martabat manusia sebagai sesama makhluk Tuhan Yang Maha Kuasa
2. Mendahulukan kepentingan bersama tanpa mengabaikan kepentingan pribadi atau golongan
3. Menghargai pendapat orang dan tidak memaksakan pendapat kepada pihak atau orang lain
4. Menyelesaikan masalah secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, yang diliputi oleh semangat kekeluargaan
5. Menjunjung tinggi supremasi hukum dengan cara menaati norma hukum dan norma lainnya secara bertanggungjawab.
6. Melaksanakan prinsip kebebasan disertai dengan tanggung jawab sosial kemasyarakatan
7. Mengutamakan persatuan dan kesatuan atau integrasi nasional
8. Tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang diskriminatif atas dasar agama, ras, keturunan, jenis kelamin, status sosial, golongan politik.

9. Melaksanakan fungsi peran kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan secara kritis dan objektif

Berhubung terorisme sangat berkaitan dengan pola pikir dan bertindak, maka bagaimana seharusnya berpikir yang berorientasi Pancasila dan bagaimana seharusnya hidup bersama sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi nilai religiusitas, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan dipahami dan dihayati. Tanpa hal tersebut maka ketrampilan dalam hidup berbangsa dan bernegara akan jatuh pada semangat yang bertentangan dengan pola berpikir dan nilai-nilai Pancasila, seperti pola pikir yang sempit, picik, negatif, kurang menerima keberadaan pihak lain, egosentris, eksklusif, memaksakan kehendak, dan main hakim sendiri.

Romo Franz Magnis-Suseno (2015) pernah mengatakan bahwa rasa kebangsaan hanya akan dapat dipertahankan kalau satu syarat dipenuhi yaitu adanya kesediaan saling menerima dan saling mengakui dalam kekhasan masing-masing. Lebih lanjut dikemukakan bahwa kesediaan untuk saling menerima dalam perbedaan itulah merupakan komitmen inti bangsa Indonesia dalam Pancasila (*Kompas*, 5 Juni 2015:-6). Mengingat teori sejarah di atas, maka terorisme dapat terulang kembali sebagaimana teori perputaran, tetapi juga mengalami perubahan dan variasi dalam tampilannya sesuai dengan kondisi dan situasi sebagaimana teori spiral. Motivasi dan sasaran terkadang tetap tapi juga berubah. Hal tersebut juga sangat ditentukan oleh faktor internal dan eksternal.

Pentingnya Berpikir Kritis

Satu hal yang tidak dapat dipungkiri, ialah perbuatan dan tindakan seseorang atau kelompok dalam masyarakat kerap kali ditentukan oleh emosi (perasaan). Di dalam emosi itu acapkali tersembunyi rasa ketakutan yang membuat manusia tidak memperhitungkan atau tidak mengkalkulasi konsekuensi dari apa yang diperbuatnya. (Notohamidjojo,2011:239). Lain dari pada itu menghadapi perubahan dan dinamika masyarakat hendaknya seseorang bersikap rasional dan menjauhkan sikap emosional yaitu *attitude* yang terbawa emosi.

Untuk mencegah terjadinya radikalisme pertama-tama yang harus dilakukan ialah seseorang wajib berusaha tidak terseret oleh pernyataan-pernyataan yang menyesatkan. Sikap demikian harus mendasari seseorang dalam beberapa hal seperti membaca surat kabar, berdiskusi, mendengarkan pidato, atau mendengarkan dan melihat radio serta televisi (Notohamidjojo,2011:239). Lebih lanjut Notohamidjojo (2011) mengingatkan bahwa menghadapi peristiwa-peristiwa di masyarakat perlu melakukan refleksi, berpikir dengan tenang dan secara rasional agar tidak menjadi korban dari pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan.

Demokrasi membutuhkan sikap kritis karena dalam demokrasi diasumsikan juga adanya kebebasan seperti kebebasan berpendapat (kebebasan pers), dan kebebasan berekspresi. Namun demikian kebebasan selalu juga mengandung sisi yang lain yaitu tanggung jawab karena jika kebebasan lepas dari tanggung jawab maka kebebasan akan cenderung digunakan untuk hal-hal yang kontraproduktif seperti radikalisme sehingga justru menjadi masalah dalam demokrasi.

Dalam memahami radikalisme dan terorisme dari perspektif kewarganegaraan perlu dikembangkan dengan pendekatan *intellectual skills* yaitu mencoba mengidentifikasi permasalahan radikalisme, perlu juga melakukan analisis masalah, mengumpulkan informasi bisa dilakukan secara induktif, kemudian berpikir kausal yaitu mencari sebab-sebabnya kenapa radikalisme terjadi, kemudian berpikir reflektif yaitu merefleksikan fenomena di masyarakat. Setelah melakukan hal-hal tersebut kemudian dicari hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ini bisa dilakukan secara deduktif. Fenomena-fenomena di seputar radikaisme yang bertentangan dan tidak sesuai dengan demokrasi itu misalnya apa saja. Dengan pendekatan seperti ini otomatis akan mengembangkan ketrampilan berpikir sehingga tidak hanya menghafal saja sifatnya.

Di tataran Sekolah Menengah penting juga untuk dikembangkan *critical thinking*, *problem solving* dan *creatif thinking* dalam rangka mengembangkan sikap kritis dan mengembangkan kemampuan memecahkan masalah seperti masalah tawuran, dan kekerasan yang sering melanda sekolah. Pembiasaan untuk berpikir kritis dan memecahkan masalah dalam proses belajar siswa akan membuat siswa memiliki keprihatinan dan apresiasi terhadap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat. Akibatnya masalah tawuran pelajar dan kekerasan yang sering terjadi bukan hanya menjadi keprihatinan pihak tertentu melainkan juga harus menjadi perhatian siswa sendiri.

Creative Minority

Dalam kerangka visi dan misi universitas sebagai *Magistorum et Scolarium*, Notohamidjojo (rektor pertama UKSW) memperkenalkan istilah *creative minority* yang dipinjam dari ahli sejarah berkebangsaan Inggris yang terkenal, Arnold J. Toynbee, dalam bukunya "*A Study of History*". Adapun yang dimaksudkannya dengan istilah tersebut ialah kelompok kaum pemimpin, yang merupakan golongan kecil, namun karena superioritas jiwa dan rohnya serta kekuatan dan keteguhan keyakinannya sanggup menunjukkan jalan dan membimbing massa yang pasif, kehilangan arah, dan mengalami kebingungan.

Kelompok yang dimaksud ialah kelompok orang-orang yang sungguh-sungguh memiliki idealisme, jiwa kepemimpinan sejati, kemampuan, kemauan dan keberanian untuk melawan arus pendapat dan perilaku umum yang kacau dan kehilangan nilai-nilai serta norma-norma hukum dan etika yang luhur. Semangat dan upaya untuk terbentuknya *creative minority* merupakan implementasi dari panggilan dan tuntutan iman Kristen yang peduli terhadap kehidupan dan persoalan-persoalan kemasyarakatan, khususnya masalah kepemimpinannya. Universitas Kristen Satya Wacana melalui hidup dan aktivitasnya, diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi terbentuknya kelompok tersebut.

Menghadapi fenomena radikalisme dan terorisme di dalam masyarakat hendaknya proses pendidikan dapat berperan agar seseorang (peserta didik) berkarakter cerdas yaitu berpikir kritis, prinsipil-kreatif dan realistis untuk mengembangkan sikap yang berdaya cipta yang diharapkan mampu menjadi unsur penting bagi perubahan di masyarakat menuju masyarakat yang adil, tertib dan sejahtera. Peran yang demikian tidak hanya terbatas pada kegiatan kurikuler tetapi juga seperti ekstrakurikuler dan ektramural yang sedikit

banyak juga telah dilakukan melalui program-program kemahasiswaan guna lebih menghayati kehidupan yang damai, sejahtera, toleran dalam rangka *learning to live together* termasuk juga dengan model-model seperti yang pernah dilakukan seperti *talent show*, dan *talk show*.

Kesimpulan

Radikalisme dan terorisme ditinjau dari perspektif kewarganegaraan sampai pada kesimpulan bahwa radikalisme dan terorisme merupakan masalah bagi demokrasi. Radikalisme dan terorisme bagi Indonesia harus diletakkan sebagai persoalan serius. Mengapa? karena baik dilihat dari sisi ideologi, prinsip negara demokrasi dan negara hukum serta karakter nasional Indonesia secara *dassolen* sebenarnya tidak ada tempat bagi radikalisme dan terorisme itu. Secara ideologi sangat jelas dalam Pancasila ada prinsip ketuhanan Yang Maha Esa, Prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, prinsip persatuan, prinsip musyawarah, dan keadilan sedangkan radikalisme ujung-ujungnya jatuh pada keadaan yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan perikemanusiaan yang adil dan beradab.

Mengembangkan sikap kritis-prinsipil dan kepekaan hati nurani termasuk kritis kepada diri sendiri dalam rangka mewujudkan masyarakat yang bebas, tertib, adil dan sejahtera merupakan tugas semua pihak. Hal itu dilakukan dengan membiasakan *civic skill* dengan menggumuli melalui proses pembelajaran dengan pendekatan seperti *critical thinking problem solving, inquiry, reflective thinking, analisis masalah*, menjelaskan, mengidentifikasi, dan melakukan evaluasi. Sedangkan dalam rangka membangun *civic virtue* perlu memahami dan menghayati nilai-nilai keutamaan seperti kemanusiaan, keadilan, kebenaran, kejujuran dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

Daftar Pustaka

- Birru, L. (2011) "Indeks Kerentanan Radikalisme" (Online) tersedia: <http://www.voanews.com/indonesian/news/Indeks-Radikalisme-di-Indonesia> (28 desember 2011).
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1995. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Edisi Kedua), Jakarta: Balai pustaka.
- Kalidjernih, F.K. (2009). *Puspa Ragam Konsep dan Isu Kewarganegaraan*, cetakan pertama, Bandung, Widya Aksara Press.
- , (2010). *Kamus Studi Kewarganegaraan: Perspektif Sosiologikal dan Politikal*, Bandung, Widya Aksara Press.
- Notohamidjojo, O. (2011). *Kreativitas Yang Bertanggungjawab*, Salatiga, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga.
- Sanusi, (1998). *Memberdayakan Masyarakat Dalam Pelaksanaan 10 Pilar Demokrasi*, Bandung, Panitia Semilok PPKN IKIP Bandung (makalah)
- Sri Wuryan dan Syaifullah (2009), *Ilmu Kewarganegaraan (Civics)*, Bandung, Laboratorium Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Pendidikan Indonesia.
- Sulasmono, Bambang S (dkk): 2002, *Mengkaji Ulang Dasar Negara Pancasila: Materi Pendidikan Pancasila*, Salatiga, P3KD Jurusan Studi PPKn- FKIP-UKSW.